

**STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMI  
COVID-19  
(Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**AKUNTANSI**



**OLEH :**

**MARIA YUNITA PALE**

**NIM : 2014110112**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
FAKULTAS EKONOMI  
MALANG  
2021**

## **RINGKASAN**

Kebijakan fiskal secara ketat mengontrol pendapatan daerah selama wabah Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi teknik kebijakan anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang untuk mengurangi dampak dari wabah Covid-19. Dalam penelitian ini, metodologi deskriptif kuantitatif digunakan. Data yang digunakan untuk Kabupaten Malang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 meliputi wawancara dan pencatatan keuangan. Teknik yang digunakan untuk mengkaji data meliputi analisis deskriptif dan analisis SWOT. Temuan kajian tersebut menunjukkan bahwa strategi pemerintah Perda Malang untuk mengendalikan dampak pandemi virus corona adalah dengan memangkas pengeluaran, mengubah sistem pemungutan pajak dengan menekankan pada pembayaran online (e-Documenting), dan lebih berkonsentrasi pada pengobatan kondisi medis. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang bermaksud memanfaatkan kesimpulan kajian tersebut untuk membantu korban Covid 19 dan menginformasikan kepada masyarakat tentang banyaknya kemungkinan pembayaran pajak secara elektronik.

***Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Pemerintahan Daerah, Strategi, SWOT***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hampir setiap perusahaan terkena dampak penyebaran Covid, kadang dikenal sebagai Coronavirus. Selain kesehatan, sektor keuangan juga memberikan dampak besar (Suhendri, 2021). Berbagai kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan pelaku ekonomi, terutama yang terkait dengan industri dan pariwisata. Pengumuman ini disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Prevalensi Covid-19 meningkat drastis dari waktu ke waktu, terutama di sejumlah kota di Pulau Jawa. Menurut data yang diperoleh pada 5 Februari 2021, terdapat 37.026 kematian, 1.182.687 remisi, dan 1.368.069 kasus positif Corona (covid19.go.id, 2021). Pembatasan Sosial Lingkup Masif (PSBB) akan diberlakukan mulai 10 April 2020 di Kota Jakarta seiring dengan meningkatnya jumlah kasus penyakit Covid. Pembatasan ini akan diberlakukan di berbagai bagian kota. Situasi ini tentu berdampak pada revolusi ekonomi domestik. Ekonomi lokal dan internasional sama-sama terkena dampak negatif. Untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang, pemerintah harus menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang sehat. Kebijakan fiskal dapat berdampak pada cara orang dibayar, berapa banyak pekerjaan yang tersedia, berapa banyak yang diinvestasikan secara nasional, dan berapa banyak uang yang dihasilkan secara keseluruhan. Akibat dampak Covid-19 yang tidak menguntungkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pendapatan

negara turun 10% tahun ini (tirto.id, 2020). Pengurangan pendapatan yang disebabkan oleh peristiwa coronavirus sebagian besar akan mempengaruhi pendapatan sampingan. Anjloknya berbagai aktivitas keuangan di dalam negeri menunjukkan bagaimana dampak pandemi virus corona yang berdampak pada penurunan harga produk telah membahayakan sistem keuangan. Biaya sangat dipengaruhi oleh Covid-19. Penyelesaian masalah terkait COVID-19 diproyeksikan tidak akan memperlebar defisit APBN secara signifikan.

Hampir setiap negara yang memiliki hubungan komersial dengan China dan Amerika Serikat telah mengalami kesulitan ekonomi sebagai akibat dari konflik perdagangan yang berlarut-larut antara kedua negara adidaya ekonomi ini, seperti yang telah berdampak pada situasi ekonomi global saat ini. Sikap keras AS terhadap China, musuh utamanya, telah membuat ekonomi global bermusuhan. 2020; Kompas Setiap Hari).

Pada akhirnya, kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami masa depan. Pada kenyataannya, kerentanan tidak akan pernah terhapus sepenuhnya; itu hanya akan dibatasi oleh taruhan tertinggi. Senada dengan itu, beberapa negara, termasuk Indonesia, sangat mengkhawatirkan prospek resesi dunia pada tahun 2020. Bank Dunia mengatakan bahwa Indonesia tidak akan terkena dampak negatif krisis global seperti Turki, Argentina, atau negara lain yang telah melihat penurunan pembangunan ekonomi selama lebih dari dua kuartal dalam presentasi berjudul "Risiko Ekonomi Global dan Implikasinya untuk Indonesia." Bahaya terbesar datang dari pelarian modal dari pasar keuangan, namun beberapa di antaranya

mungkin kembali. Akibatnya, dampak langsung agak terkendali. Padahal, efek jangka menengah, yang berpotensi memangkas PDB menjadi 4,6% pada 2021 jika tidak diatasi, adalah yang paling dikhawatirkan oleh Bank Dunia.

Melihat kesiapan Indonesia menghadapi krisis keuangan global dari sudut pandang kebijakan fiskal nasional dapat menjadi informasi. Sistem perpajakan bertindak sebagai mekanisme untuk menghasilkan fleksibilitas pendapatan yang dianggarkan, dan kondisi kontraktif dipertahankan melalui interaksi antara aktivitas regulasi dan stabilitas ekonomi. Mengingat anggaran negara, pergolakan yang tidak merata baik di ekonomi individu maupun ekonomi secara keseluruhan bahkan mungkin berbahaya.

Pakar publik, sebagian besar, telah mengembangkan strategi perubahan penilaian publik yang pada dasarnya dapat mendukung keuangan publik melalui perubahan penilaian berkelanjutan dan aturan seleksi melalui latihan beban yang menghubungkan strategi yang dirancang oleh ketidaknyamanan yang menyatu dengan baik.

PP/No./2020 tentang Pendekatan Moneter Negara dan Penguatan Kerangka Moneter untuk Menghadapi Pandemi Penyakit Covid 2019 dan Peraturan Penanganan Bahaya Yang Dapat Membahayakan Perekonomian Rakyat serta Kekokohan Kerangka Moneter menjabarkan rencana pemerintah untuk mengelola perekonomian rakyat. Selain itu, diterbitkan Pers Nomor 54 Tahun 2020 yang membahas secara mendalam modifikasi postur dan APBN 2020. Cara-cara tersebut

tentunya digunakan dalam upaya menghentikan penyebaran virus corona yang berpotensi merugikan perekonomian negara.

Pada tahun 2021, Perda Malang akan mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (Bantalan) akibat Pandemi Covid atau yang dikenal dengan Virus Corona. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini ditunjukkan dalam Laporan Pernyataan Pertanggungjawaban (LKPJ). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun Kabupaten Malang tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah yang lebih besar dari target. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang tahun ini sebesar Rp 3,8 miliar, telah tercapai 102,94%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar diperoleh melalui pajak dan retribusi daerah. Selain itu, laju penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat masalah ini tidak terhapuskan dengan parah karena begitu banyak tindakan yang dilakukan selama wabah ini karena belas kasihan. Administrasi Badan Pendapatan Daerah akan lebih fokus pada pemanfaatan teknologi untuk mengumpulkan retribusi dan pajak untuk mendapatkan hasil terbaik. Pemerintah daerah Malang Rule masih berupaya meningkatkan PAD di sana secara signifikan hingga tahun 2020. Sektor penerimaan akan lebih memperhatikan pajak hotel dan restoran serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) terus memungut pajak hotel, hiburan, dan restoran selama wabah ini atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Misalnya, hotel menyeter 10% dari seluruh pendapatannya sebagai kontribusi pajak.

Kepala Bappenda Kabupaten Malang Bapak Made Arta Wedanthara menegaskan karena adanya wabah Covid-19, pihaknya belum bisa memberikan skema subsidi untuk perumahan, makan, dan hiburan. Untuk mengurangi efek pajak yang melanggar hukum, Komisi Penghapusan Penghinaan (KPK) saat ini menekankan pembayaran di setiap situs, menyelesaikan semua pertukaran tugas secara online, dan beralih ke kerangka kredit saja atau kredit saja. Untuk menghindari penipuan pajak, pembayaran pajak dilakukan secara online, khususnya menggunakan program Sipanji. Selain itu, organisasi mencapai tujuannya untuk Anggaran Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). <https://www.harianbhirawa.co.id>). Karena permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti topik tersebut. **“Strategi kebijakan fiskal daerah pemerintahan Kabupaten Malang dalam menghadapi dampak pandemi covid-19”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menilik sejarah sebelumnya, maka akan diulas beberapa keprihatinan berikut: Bagaimana mekanisme pengaturan moneter teritorial Pemerintah Rejim Malang untuk mengendalikan dampak pandemi covid-19?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kabupaten Malang menerapkan kebijakan fiskal daerah dalam menghadapi wabah covid-19.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang tercantum di bawah ini dapat dihasilkan dari penelitian ini:

1. Bagi Peneliti

Dapat digunakan untuk membandingkan apa yang dipelajari akademisi di perkuliahan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan untuk memajukan pengetahuan.

2. Bagi Universitas

Studi ini dapat digunakan sebagai panduan untuk mengajar peneliti berikutnya selain menjadi bacaan berharga dan sumber tambahan pengetahuan.

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

Secara khusus, Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, diharapkan dapat memperoleh manfaat dari studi ini dengan lebih memahami pilihan kebijakan fiskal yang tersedia untuk mengatasi epidemi covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. (2005). *Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 173–192. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Adiyanta,FC.Susila. (2020). *Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1: 162-181
- Ananda,C.F.2017.*Pembangunan Ekonomi Daerah:Dinamika dan Strategi pembangunan*.Malang:UB Press.
- Arieza, U. (2020).*Melihat Lagi Manfaat Bansos Selamatkan Ekonomi RI dari Resesi*. CNN Indonesia.
- Arifin, D. (2020, April).*Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional - BNPB*.Bnpb.Go.Id.
- Arnani,M.(2020).*Timeline Wabah Virus Corona,Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global*.
- Aksara, Bima.(2020).*Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19, Bebas. Kompas.id*. <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19>
- Arnani, Mela (2020). Corona di Indonesia Tembus 200.000, Ini 5 Daerah dengan Jumlah Kasus Tertinggi dan Terendah.Kompas.com <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/08/194500265/corona-di-indonesia-tembus-200.000-ini-5-daerah-dengan-jumlah-kasus?page=all>.
- Blandina , S . R.,Fitrian ,A . N., & Septiyani , W . (2020).*Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi Efektor*, 7(2), 181–190.
- Bogdan, Robert dan Taylor. (1992) Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief Rurchan, (Surabaya : Usaha Nasional).
- Covid.go.id.2020.

- Damayanti, Theresia Woro & Supramono. 2005. *Perpajakan Indonesia*.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Dhyaksa, A. 2020. *11 Poin Penting Kebijakan Ekonomi Jokowi Dalam Menghadapi Wabah Corona*.
- DDTC News. (2020, August). *Baru! Insentif Pajak Final Jasa Konstruksi Ditanggung Pemerintah*. News.Ddte.Co.Id.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020a). *Kebijakan Pajak untuk Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020b). PMK-110/PMK.03/2020. *Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020c). PMK-23/PMK.03/2020 *Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona Sektor Industri*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020d). PMK-44/PMK.03/2020 *Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19*.
- Elvina, L. (2020, March). *WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global*. Kompas.Tv.
- Fiscuswannabe, 2013. *Implikasi Kebijakan Fiskal*.
- Fathurrahman, A. (2012). *Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1), 72–82. <https://doi.org/10.18196/jesp.13.1.1265>
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). *Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19*.
- Halim, A. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanifi, I. 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Ihsanuddin. (2020, April). *Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana Nasional*. Kompas.Com.

- Jayani, D. H. (2020). *Defisit APBN Membengkak Jadi Rp 883,7 Triliun pada November 2020*. Katadata.Id.
- Jufra,A. A. (2020).*Studi Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Pasca Pandemi (COVID-19) dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara*.
- Juliani, H. (2020). *Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19*.
- Khuasaini,M.2018.*Keuangan Daerah*.Malang:UB Press.
- Maski, B. M. G. (2012). *Analisis Dinamis Pengaruh Instrumen Fiskal terhadap PDB dan Inflasi di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013.
- Maulida, R. (2018). *Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Macam-Macam Kebijakan Fiskal*. Onine-Pajak.Com.
- Muda,D.A.D. N. E. I.(2020).*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Benefita, 5(2), 212–224.
- Muliati, N. K. (2020). *Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Widya Akuntansi Dan Keuangan,2(2), 78–86. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i2.874>
- Mardiasmo.2018.*Perpajakan Edisi Revisi*.Yogyakarta:CV.Andi Offset.
- Nainggolan,E.U.2020.*Kebijakan Fiskal dan Moneter Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19*.
- Nainggolan, E. (2020). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Mengadapi Dampak Covid-19*.Djkn.Kemenkeu.Co.Id.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19.html>
- Noor,M.H.(2016).*DJKN Sebagai Defender Fiskal*.Djkn.Kemenkeu.Co.Id.<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11395/DJKN-Sebagai-Defender-Fiskal.html>
- Purwanto, A. (2020). *Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Jasa Keuangan untuk Mengatasi Dampak Covid 19 di Indonesia*. Kompaspedia.Kompas.Id.<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-fiskal-moneter-dan-jasa-keuangan-untuk-mengatasi-dampak-covid-19-di-indonesia>.
- Puspita,Ayu Furi.2016.*Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah*.

*Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.*

*Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.*

*Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata-nan Norma Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019.*

Suhendri,H.,Iriani,N.I.& Tanggu,E.A (2020).Kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan saat terjadinya Covid-19.Referensi :Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi,9(1),63-67.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020, April). *Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi Covid-19*- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Setkab.Go.Id.

Setiawan, H. (2018). *Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (Svar)*.Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 3(2). <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i2.9169>.

Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*.Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi